

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan pokok yang mendorong penulis untuk menetapkan politik luar negeri Indonesia terhadap Rusia dalam bidang pertahanan militer dengan mengambil studi kasus kerja sama militer Indonesia-Rusia di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 sebagai judul skripsi ini. Pertama, karena pada masa pemerintahan sebelumnya Presiden Megawati sudah menjalin kerja sama militer dengan Rusia padahal terdapat konflik politik dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sehingga menarik kenapa SBY melanjutkan kembali kerja sama strategis dengan Rusia yang dulu lebih dikenal dengan nama Uni Soviet. Kedua, kecenderungan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjalin kerja sama pertahanan dengan beberapa negara yang secara militer bersaing dengan Amerika Serikat (AS) seperti Cina, Rusia, Pakistan dan beberapa negara Eropa Timur.¹ Keputusan SBY Indonesia tidak memilih Amerika Serikat sebagai rekanan dalam kerja sama pertahanan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah 2004 sampai 2009 bertolak belakang dengan latar belakang SBY yang pernah menimba ilmu kemiliteran di Amerika Serikat. Bahkan beberapa kali. Di tahun 1976, ia ditempa di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), serta Airbone and Ranger Course (Fort Benning). Pada tahun 1983, ia kembali ke Amerika Serikat untuk melakukan on-the-job-training di 82-nd Airbone Division (Fort Bragg). Dan setelah ia lulus dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), SBY

¹ <http://www.tempo.co/read/news/2005/04/28/05560263/Pengamat-Militer-Kebijakan-Pertahanan-Tanpa-AS-Tepat>, diakses tanggal 9 November 2014. jam 19. 34 WIB.

kembali lagi ke Amerika Serikat untuk belajar di US Command and General Staff College pada tahun 1991. Sebagai tambahan, beliau juga lulus dari Command and General Staff College (Fort Leavenworth) di Kansas. Sementara gelar sipil yaitu Master of Arts (MA) diraihnya dari Webster University di Missouri. Berkali-kali menempuh pendidikan di negeri tersebut tentunya membuatnya mendapatkan perhatian tersendiri tetapi kebijakan militer di era pemerintahannya lebih condong ke Rusia sehingga menarik untuk mengetahui **“Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Rusia Dalam Bidang Pertahanan Militer Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”**

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk membahas dan menganalisa kepentingan Indonesia dalam menjalani kerja sama militer dengan Rusia.
2. Untuk membahas Dinamika Hubungan Indonesia dan Rusia dengan berbagai isu dan peristiwa yang mendukung ditandatanganinya sebuah perjanjian kerja sama militer.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran aktor rasional dalam membuat kebijakan luar negeri khususnya perjanjian kerja sama pertahanan dan militer.

C. Latar Belakang Permasalahan

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia adalah mengabdikan kepada tujuan nasional. Adapun tujuan nasional jangka panjang adalah sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD'45 yakni : “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”, yang pada Indonesia hampir sama dengan tujuan nasional setiap negara (keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban). Sedangkan, tujuan nasional jangka pendek tergantung dari apa yang ditetapkan untuk dicapai dalam waktu yang singkat. Hal itu biasa disebut kepentingan nasional.²

Letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudra menjadikan posisi Indonesia menjadi negara yang paling strategis dikawasan asia-pasifik. Hal ini kemudian mengundang banyak negara besar yang berkepentingan untuk menjalin kerja sama baik di bidang politik, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Khusus mengenai pertahanan dan keamanan sejarah mencatat kerja sama yang cukup erat antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Salah satu peran penting Amerika Serikat dalam perundingan paska proklamasi kemerdekaan terutama saat pembebasan papua barat menjadi awal hubungan kerja sama yang berlanjut pada bantuan penuh kemiliteran AS terhadap Indonesia demi menjauhkan kawasan asia pasifik dari cengkraman komunisme.

Namun hubungan tersebut sempat mengalami pasang surut, terutama ketika Amerika Serikat mengeluarkan embargo senjata yang disebabkan konflik internal Indonesia di wilayah Timor-timur di tahun 1999. Indonesia dianggap tidak lagi memenuhi prasyarat yang muncul ditengah perubahan kepentingan AS yaitu penegakan HAM dan demokrasi. Di era embargo kita cukup mengalami kesulitan pengembangan kemiliteran baik dalam bidang pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) maupun pengembangan sumber daya.

² Sumpena Prawirasaputra, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Remaja Karya CV, Bandung, 1984, hal. 31

Sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia terutama setelah hampir empat belas tahun diembargo oleh sejumlah Negara produsen khususnya Amerika Serikat menunjukkan kondisi yang sudah tidak layak guna. Sudah seharusnya pemerintah meremajakan secara bertahap semua alat utama system senjata (alutsista) tidak layak pakai yang dapat membahayakan keselamatan prajurit.

Hanya 40-50% kesiapan operasional minimum sistem persenjataan TNI saat ini diseluruh matra angkatan, persentase tersebut jauh di bawah persentase kesiapan minimal operasional TNI. Dapat dikatakan separuh kekuatan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI tidak sanggup beroperasi maksimal. Penyebabnya, baik karena faktor usia peralatan maupun terbatasnya pengadaan komponen dan suku cadang. Alutsista yang dipakai TNI AL dan AU sampai sekarang 70 persen buatan Amerika Serikat.³

Pengadaan alutsista dari Rusia saat industri strategis dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan kelengkapan peralatan dan teknologi militer. Alasan pemilihan Rusia dibandingkan dengan negara lain seperti menggunakan produk Amerika Serikat atau Eropa, selain harganya lebih mahal juga selalu ada hambatan politis yang bisa menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Rusia umumnya tidak sulit soal lisensi, izin dan politik. Pembelian alutsista dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, umumnya dirumitkan dengan persyaratan penegakan HAM (dikaitkan masalah Aceh, Poso atau Papua), masalah lisensi, dan prosedur pembelian yang rumit. Pengalaman dengan Inggris misalnya, tank Scorpion dan panser serbu Stromer untuk operasi menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak boleh dipakai di Aceh karena terkait syarat kerja sama hanya untuk pertahanan luar

³ Wisnu Dewabrata, *dalam Jurnal Transnasional Vol 3 No 2 Februari 2012 FISIP Universitas Riau*, , hlm 3

Di era Presiden Megawati untuk mengatasi embargo Amerika Serikat Megawati memprakarsai kelanjutan hubungan kerja sama dengan Rusia, Presiden Megawati ingin mengulang kembali kerja sama dan hubungan baik seperti pada masa pemerintahan ayahnya, Presiden Soekarno. Setelah pemerintahan Presiden Megawati, hubungan Indonesia-Rusia semakin membaik. Kedua kepala negara juga menandatangani Deklarasi mengenai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan diantara Indonesia dan Rusia abad 21. Deklarasi tersebut membuka tahap baru hubungan bilateral diantara kedua negara untuk bekerja sama disemua bidang. Presiden Vladimir Putin dan Presiden Megawati menyepakati dilakukannya kerja sama militer yang lebih erat. Selain kerja sama militer, kerja sama dalam bidang ilmiah-teknik juga mengandung potensi besar.

Dinamika hubungan kerja sama terus berlanjut, Uni Soviet menganggap Indonesia sebagai sekutu yang signifikan di Asia- Pasifik. Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Rusia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di mulai ketika pemerintah Rusia menawarkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia pada tahun 2005. Indonesia dan Rusia sepakat untuk membentuk Komisi Kerja sama Teknik Militer (KKTm). Pembentukan KKTm ditandatangani dalam Sidang Komisi Pertama di Rusia pada tanggal 22 September 2005.

Hubungan kerja sama Indonesia dan Rusia kembali terjalin seiring dengan bangkit kembali Federasi Rusia. Penentuan dan pelaksanaan kerja sama pertahanan militer Indonesia dengan Rusia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat dipengaruhi oleh kondisi pertahanan militer negara yang mencakup perkembangan alutsista Indonesia saat ini. Walaupun amerika telah mencabut embargo terhadap Indonesia, hal ini tidak menutup niat dan tetap melakukan kerja sama militer bersama Rusia dan tetap menjaga hubungan baik

dengan Amerika Serikat. Kerja sama pertahanan ini juga bermanfaat bagi Indonesia selanjutnya, karena Indonesia tidak hanya tergantung pada satu Negara saja dalam hal pengadaan peralatan teknik militer dan penyediaan persenjataan.

Kerja sama dengan Rusia bukan berarti Indonesia telah mengubah kebijakan luar negeri yang selama ini cenderung ke Barat. Tetapi, menunjukkan bahwa membuka kerja sama dengan Rusia adalah upaya pelurusan kembali praktek kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia tidak pernah memusuhi barat dan Amerika Serikat. Tetapi Indonesia menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan yang besar agar tidak selalu terhambat. Baik oleh hambatan politik atau hambatan lainnya.⁴

Dalam bidang pertahanan militer, Rusia memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia. Pada saat operasi pembebasan Irian Barat, Uni Soviet memberikan dukungan militer bagi Indonesia. Kekuatan Angkatan Laut (AL) meningkat 5 kali lipat, dengan didatangkannya peralatan tempur dari Rusia seperti: kapal penjelajah, Destroyer, kapal selam, termasuk Tank Amphibi PT-76. Sementara itu Angkatan Udara (AU) memiliki 160 pesawat tempur, diantaranya: pesawat pembom jarak jauh TU-16 KS, MIG 21, MIG-19 dan MIG-17. Dalam bidang pendidikan, kedua kepala negara sepakat untuk mendirikan Universitas Persahabatan Bangsa Bangsa di Moskow, yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Patrice Lumumba. Nikita Khrushchev juga mengundang mahasiswa Indonesia untuk menuntut ilmu di Uni Soviet dengan beasiswa dari pemerintah Uni Soviet. Pada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Vladimir Putin pada tanggal 29 November 2006 di Rusia, disepakati bentuk kerja sama di bidang militer, politik dan ekonomi. Di bidang ekonomi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

⁴ Fardiansah Noor, "*DPR Dukung Penuh Kebijakan Politik Bebas Aktif*", diakses dari: www.mediaindonesia.com. Pada tanggal 8 Oktober 2014

mendorong investasi Rusia agar masuk ke Indonesia, karena Volume perdagangan kedua belah pihak pada tahun 2005 dengan perkiraan pendahuluan mencapai 680 juta Dollar AS, angka tersebut melebihi 42% hasil tahun 2004 (480 juta Dollar AS).

Pemerintah Indonesia dan Rusia menandatangani tujuh nota kesepahaman di bidang pertahanan, politik, ekonomi dan hukum. Ketujuh nota kesepahaman yang ditandatangani yaitu, kerja sama eksplorasi luar angkasa untuk maksud damai, kerja sama penggunaan energi atom untuk maksud damai, kerja sama antar kejaksaan agung, perlindungan intelektual dalam kerja sama teknik militer. Selain itu ditandatangani juga nota kesepahaman dalam bantuan implementasi militer Rusia-Indonesia 2006-2010, pembebasan visa kunjungan singkat untuk dan kepentingan dinas dan diplomatik, dan kerja sama bidang pariwisata. Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Vladimir Putin di ruang Malachite Fuyet, Istana Kepresidenan Rusia.

Pada tanggal 6 September 2007, Presiden Vladimir Putin mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan terhadap kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Desember 2006, dan merupakan kunjungan pertama dari Presiden Rusia sejak tahun 1991. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Vladimir Putin ingin mengkaji ulang hubungan kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2003, terutama di bidang militer dan ekonomi perdagangan. Kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Indonesia menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerja sama, di Istana negara.

Pada tanggal 6 September 2007, Presiden Vladimir Putin mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan terhadap kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Desember 2006, dan

merupakan kunjungan pertama dari Presiden Rusia sejak tahun 1991. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Vladimir Putin ingin mengkaji ulang hubungan kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2003, terutama di bidang militer dan ekonomi perdagangan. Kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Indonesia menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerja sama, di Istana negara. Beberapa MoU dan perjanjian kerja sama yang ditandatangani, yaitu: Kerja sama Pemerintah RI dan Pemerintah Rusia dalam perpanjangan utang negara kepada Pemerintah RI, ditandatangani oleh Dirjen Manajemen Utang Departemen Keuangan RI Rahmat Waluyo dan Deputy Menteri Keuangan Rusia A.A Storchak. Kerja sama teknik antara Departemen Keuangan RI dan Bank Kerja sama Negara untuk Pengembangan dan Ekonomi Luar Negeri (Vnesheconombank) di bidang prosedur teknik dalam hal settlement dan keeping accounts, ditandatangani oleh Dirjen Manajemen Utang Departemen Keuangan RI Rahmat Waluyanto dan Deputy Menteri Keuangan Rusia A.A. Storchak.⁵

Bangsa Indonesia, adalah bangsa yang cinta damai. Namun demikian, kedaulatan, kemerdekaan dan keutuhan wilayah juga merupakan kepentingan nasional yang sangat penting. Terkait dengan penambahan kualitas dalam bidang kekuatan militer, Rusia menjadi salah satu negara yang tepat untuk menjalin kerja sama, di mana sejarah menyatakan keunggulan negara tersebut di bidang ketahanan dan militer dari zaman Uni Soviet sampai pemerintahan Vladimir Putin.

Seperti telah di samping sebelumnya bahwa kebutuhan Indonesia akan senjata militer semakin besar. Sedangkan kerja sama dalam bidang keamanan dan militer yang dianggap paling signifikan, yaitu dengan kawasan seperti Asia tenggara tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keamanan militer Indonesia. Kebutuhan

⁵ <http://www.satuislam.org/nasional/nilai-positif-jalin-kerja-sama-dengan-Rusia/> diakses 9 November 2014, jam 20.38 WIB.

ketahanan ini menuntut Indonesia untuk mencari strategi baru. Sebenarnya Indonesia memiliki banyak alternatif kerja sama dengan berbagai negara selain Rusia yang juga memiliki cadangan senjata. Walaupun Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai kawasan seperti Amerika Serikat dan Eropa, namun kerja sama tersebut tidak menjadi prioritas penguatan kerja sama. Yang menarik di sini adalah mengapa kemudian pilihan Indonesia jatuh ke Rusia sebagai prioritas padahal Amerika Serikat dan Rusia saling berseteru atau bersaing dalam penjualan senjata di dunia.

Dengan adanya latar belakang yang di jelaskan pada bagian ini maka penulis tertarik untuk mengetahui Politik Luar Negeri Indonesia dan kerja sama internasional antara kedua Negara maka penelitian ini berjudul tentang **“Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Rusia dalam Bidang Pertahanan Militer Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”**.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Mengapa Politik luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono lebih memprioritaskan menjalin kerja sama di bidang pertahanan dan militer dengan Rusia?

E. Kerangka Dasar Teortik

Untuk melihat permasalahan di atas, Digunakan kerangka pemikiran, baik teori maupun konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan. Sebelum menguraikan teori yang dipakai untuk menganalisa permasalahan yang ada,

lebih dulu akan diuraikan apa yang disebut teori. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu terjadi, dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Dari pengertian ini, secara gamblang teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi.⁶ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu atau fenomena tertentu. Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making process*) menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternative yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin dilakukan dan sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Menurut William D.Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau Foreign policy, Yaitu :⁷

“apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan.

Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :

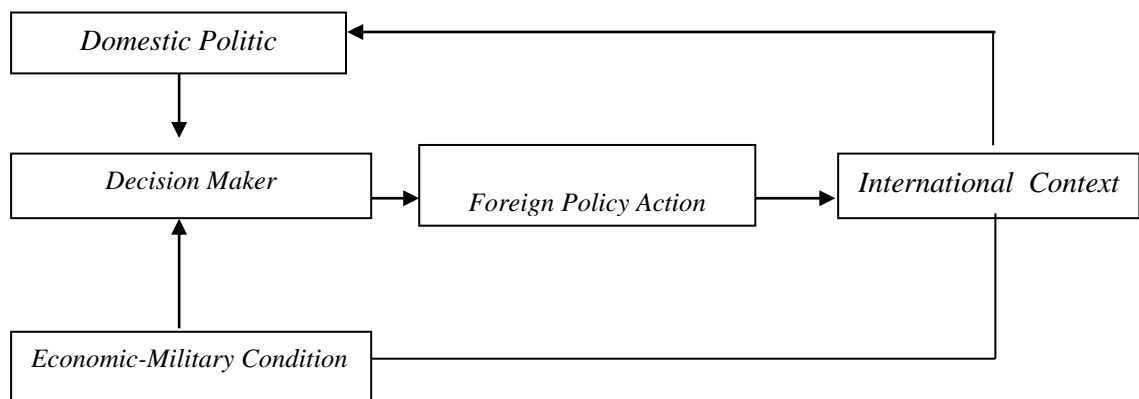
⁶ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*, (Yogyakarta: LP3ES,1990) Hal.109

⁷ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, Bandung , Sinar Baru:1992. hal.30.

- Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya.
- Situasi Ekonomi dan Militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
- Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 1
Bagaimana Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri

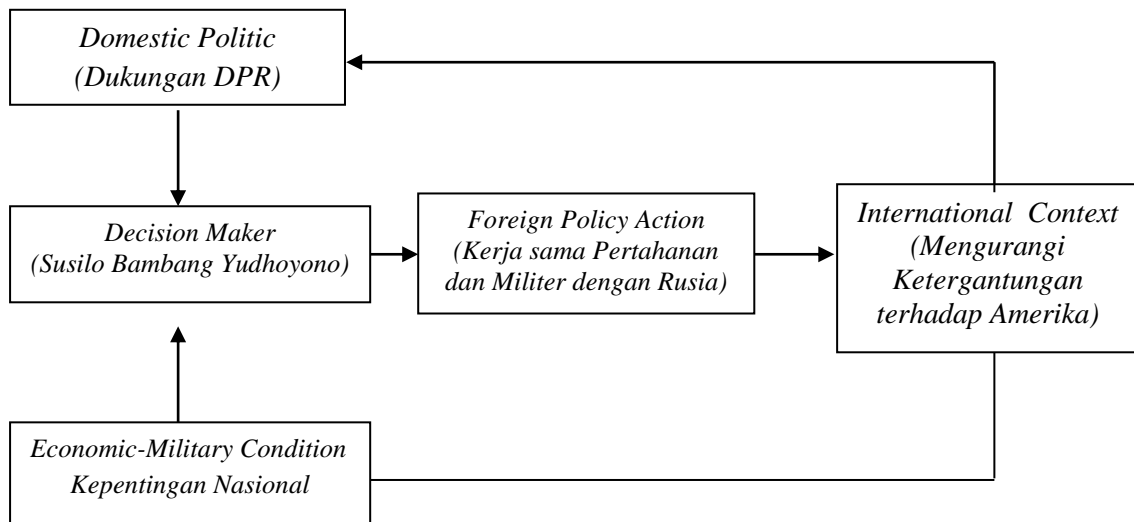


Sumber : William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional,
Suatu Telaah Teoritis, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30

Menurut gambar di atas, politik luar negeri memang dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks Internasional akan tetapi pengambil keputusan luar negeri di mana dalam konteks ini presiden sebagai pengemban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, di mana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Penghitungan secara rasional, Indonesia rugi dalam politik dalam negeri pengambil keputusan di mana terdapat kepentingan baik itu murni kepentingan negara atau pribadi dari pengambil keputusan ini.

Sebelum penjelasan yang lebih jauh, Penulis akan gambarkan aplikasi teori William D.Coplin tersebut sebagai berikut:

Gambar II
Aplikasi gambar teori pengambilan keputusan luar negeri Wiliam D.Coplin
Politik Luar Negeri



Faktor politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer dan konteks internasional, faktor tersebut memang sesuai dengan apa yang melandasi terciptanya kebijakan menjalin kerja sama pertahanan dan militer dengan Rusia. Di mana kondisi politik dalam negeri, kepentingan ekonomi dan militer dan faktor konteks Internasional sangat mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan luar negeri.

a. Politik Dalam Negeri

Jika dilihat dari situasi politik dalam negeri, kerangka konseptual untuk politik dalam negeri ini berfokus pada kolerasi antar pengambil keputusan (*decision makers*) dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Aktor-aktor politik tersebut disebut dengan “*policy influences*” (yang mempengaruhi kebijakan). Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri ini dengan para pengambil keputusan disebut “*policy influences system*” (sistem pengaruh kebijakan).

Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalin kerja sama di Bidang Pertahanan dan Militer dengan Rusia dipengaruhi oleh keinginan untuk meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah 2004 sampai 2009 yang didukung oleh DPR di mana Presiden SBY mendapatkan dukungan hampir 65% dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Ekonomi dan Militer

Bagi Indonesia, inovasi sistem pembelian senjata penting dilakukan untuk mengurangi beban devisa dan efek-efeknya pada neraca pembayaran, serta menstimulasi perkembangan industri pertahanan domestik. Beberapa alasan Indonesia memilih Rusia sebagai negara produsen persenjataan militer terbaru bagi TNI, yaitu :⁸

1. Sejarah hubungan militer Indonesia-Rusia.
2. Kemudahan persyaratan kerja sama bidang pertahanan militer dari Rusia.
3. Rusia lebih fleksibel mengenai harga seperti bisa dibayar dengan komoditas yang dimiliki Indonesia.
4. Rusia memiliki teknologi militer yang sepadan dengan Eropa dan USA.

Bentuk kerja sama pertahanan yang akan dilakukan dengan Rusia berupa penjualan senjata dan alat pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Selain itu, juga diusahakan peningkatan kemampuan manajemen perwira dengan bersekolah setingkat Lemhannas di Indonesia atau sebaliknya. Serta peningkatan kemampuan pasukan khusus, misalnya pelatihan spesialisasi pilot pesawat dan spesialisasi awak kapal selam. Rusia memberikan pinjaman *state credit* 1 Milyar Dollar AS bagi pengadaan persenjataan Indonesia untuk masa 2006-2010. Kredit negara ini mempunyai keunggulan berupa efisiensi, karena tidak memakai management fee dan syarat lainnya.

⁸ [http://www.satuislam.org/nasional/nilai-positif-jalin-kerja sama-dengan-Rusia/diakses 8 November 2014, jam 20.30 WIB](http://www.satuislam.org/nasional/nilai-positif-jalin-kerja-sama-dengan-Rusia/diakses%208%20November%202014,%20jam%2020.30%20WIB)>

Kementerian pertahanan RI menggunakan pinjaman yang diberikan Rusia untuk pengadaan helikopter MI-17-V5 dan Helikopter MI-35P beserta persenjataannya bagi TNI AD untuk kebutuhan helikopter serbu dan transportasi; kapal selam kelas kilo dan kendaraan infanteri tempur BMP-3F untuk TNI AL; TNI AU yang menjadi prioritas, akan melengkapi satu skuadron pesawat tempur Sukhoi, di mana sebelumnya Indonesia telah memiliki 4 Sukhoi. Setelah 4 Sukhoi di persenjatai, maka akan dilanjutkan dengan pengadaan 6 Sukhoi, terdiri dari 3 unit Sukhoi SU-27 dan 3 unit Sukhoi SU-30, serta 6 paket peralatan avionic dan persenjataan Sukhoi TNI AU.

Penawaran *State Credit* sebesar 1 Milyar Dollar Amerika Serikat dari Pemerintah Rusia memiliki periode selama 5 tahun (2006-2010) yang nantinya diambil dari *State Credit* yang sudah disepakati Pemerintah Indonesia untuk keseluruhan kebutuhan alutsista TNI sebesar 3,7 Milyar Dollar AS sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Jadi total *State Credit* sebesar 3,7 Milyar Dollar yang akan diperuntukan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan alutsista TNI periode tersebut.

Teknis dari proses pembelian alutsista akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun pertahun, sehingga dapat diperkirakan sekitar 250-300 Juta per tahunnya akan diambil dari *State Credit* 1 Milyar Dollar AS selama jangka waktu 5 tahun. Untuk pembayaran tahun pertama sekitar 220 Juta Dollar AS, uang mukanya akan dibayarkan Menteri Keuangan sebesar 16,4 Juta Dollar dan dilaksanakan tahun 2007, tergantung pencairan APBN.

Dijelaskan pula, dari sekitar 70 persen total *State Credit* 1 Milyar Dollar AS tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan alutsista, antara lain pesawat tempur Sukhoi, Kapal Selam “KiloClass” dan Helikopter Serbu. Sistem kredit negara antara Indonesia dengan Rusia, dilakukan dengan cara yang sederhana tidak berbelit-belit dan

tanpa perantara. Misalnya, Kementerian pertahanan ingin membeli sebuah alutsista dari Rusia, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan (Depkeu), maka Kemenhan RI langsung dengan Departemen pertahanan Rusia yang memiliki kewenangan untuk menunjuk salah satu perusahaan Rusia yang akan memproduksi alutsista yang dibutuhkan RI, misalnya perusahaan Rosoboroneksport. Sehingga Rosoboroneksport yang akan berhadapan dengan Kemenhan RI. Rosoboroneksport mempunyai instansi pendukung lain dalam hal administrasi, seperti: pengkapalan dan angkutan.

Memanfaatkan pinjaman Rusia untuk memperkuat alat pertahanan di Indonesia memberi keuntungan bagi Indonesia di tengah tengah krisis pendanaan untuk pembaruan maupun pemeliharaan alat pertahanan saat itu, Pembelian persenjataan melalui kredit dari Rusia ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Penambahan persenjataan tempur akan memberikan efek penghambat kepada negara-negara lain yang mencoba mengusik kedaulatan wilayah Indonesia.

Kerja sama pembelian perlengkapan militer dari Rusia dinilai paling menguntungkan. Selain prosesnya tidak rumit, pembelian langsung pada badan yang ditunjuk pemerintah dapat menghemat anggaran 40 persen, karena tanpa melalui pialang. Sistem pembayaran yang diajukan pemerintah Indonesia salah satunya dengan sistem imbal beli alutsista. Imbal beli alutsista dengan komoditas batubara misalnya, adalah memberikan kesempatan bagi pemerintah dan pengusaha Rusia untuk berinvestasi dalam eksplorasi batubara di Indonesia, bukan menukar komoditas batubara dengan alutsista.

Rusia dalam menjual produk pertahanan militer sama kualitasnya dengan produk yang Rusia sendiri gunakan, tidak ada istilah *downgrade*. Tidak seperti Amerika

Serikat, setiap produk yang dijual, beberapa fitur dikurangi karena takut kalah saing. Rusia juga tidak keberatan dalam hal transfer teknologi dan modifikasi teknologi yang dilakukan oleh Indonesia. Sebagai contoh pada saat pembelian sukhoi oleh Indonesia, pihak Rusia lupa menyertakan adaptor pengisian bbm pesawat, akhirnya teknisi Indonesia melakukan sedikit modifikasi pada adaptor pengisian bbm milik A-4 skyhawk, dan akhirnya Sukhoi bisa terbang perdana dari pangkalan TNI AU.⁹

c. Konteks Internasional

Dalam konteks internasional kerja sama di bidang pertahanan dan militer dengan Rusia dipengaruhi karena Rusia merupakan pilihan rasional saat industri strategis dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan kelengkapan peralatan dan teknologi militer. Kerja sama dengan Rusia merupakan salah satu cara Indonesia untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam bidang persenjataan yang saat itu sudah mencapai 70 persen. Selain itu sebagai aplikasi prinsip politik bebas aktif, Indonesia tidak akan melakukan kerja sama aliansi strategis dengan negara lain. Aliansi strategis akan dinilai sebagai sebuah keberpihakan pada kekuatan politik dunia tertentu dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bebas aktif. Kerja sama strategis dinilai dapat mengakomodasi bentuk kerja sama lebih dalam dan kuat dengan negara lain, tanpa mengharuskan adanya aliansi. Indonesia telah menjalin kerja sama strategis dengan beberapa negara diantaranya dengan Rusia, India, dan Amerika Serikat.¹⁰

2. Model Aktor Rasional

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan

⁹ [http://www.satuislam.org/nasional/nilai-positif-jalin-kerja-sama-dengan-Rusia/diakses 8 November 2014, jam 20.30 WIB](http://www.satuislam.org/nasional/nilai-positif-jalin-kerja-sama-dengan-Rusia/diakses%208%20November%202014,%20jam%2020.30%20WIB)>

¹⁰ Maksimalisasi Kerja sama Strategis Militer Indonesia-Amerika Serikat oleh: Ni Made Vira Saraswati, peneliti Institute for Sustainable Reform dalam <http://analisisinsure.wordpress.com/2014/03/08/maksimalisasi-kerja-sama-strategis-militer-Indonesia-as>, diakses 8 November 2014, jam 21.34 WIB.

dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*.

Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan panalaran yang sungguh-sungguh berusaha menerapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu negara, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan Indonesia rugi atas masing-masing alternatif itu.¹¹

Dalam model aktor rasional digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif itu menggunakan optimalisasi hasil. Para pembuat keputusan itu digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaanya. Mereka juga diasumsikan dapat memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga dapat melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang mereka terapkan.

Graham T. Allison memberikan gambaran mengenai proses pembuatan keputusan model yang digunakan adalah model aktor rasional, model proses organisasi dan model politik birokratik. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan. Aktor rasional dipandang sebagai orang yang mengetahui tentang pilihan-pilihan yang tersedia dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan sebelum membuat

¹¹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990 Hal. 234.

keputusan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Di mana pemerintah dianalogikan sebagai individu yang bernalar dan terkoordinasi. Setiap individu melalui beberapa tahap intelektual menerapkan dan menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Maka unit analisis pada pembuatan keputusan itu adalah pilihan-pilihan yang diambil pemerintah. Dengan demikian, analisis tentang politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa itu sendiri. Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional, dan kita pada umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan terutama yang menyangkut politik luar negeri dibuat secara rasional. Karena itulah, menurut Allison, model ini paling sering diterapkan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri.

Batasan rasional mempunyai arti yang spesifik, dalam proses pembuatan keputusan didasarkan pada empat langkah:¹²

1. Pemilihan yang objektif yang bernilai dari suatu kebijakan yang sudah pasti ditujukan pada tujuan yang maksimal.
2. Pemilihan atas alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.
3. Perhitungan dari Indonesia dan rugi dari alternatif yang diambil.
4. Pemilihan alternatif yang memberikan hasil yang optimal.

Apabila kita terapkan teori rasional pada kebijakan dalam menjalin kerja sama di bidang pertahanan dan militer dengan Rusia hal ini merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didasarkan pada konsep *rational choice* yang memiliki asumsi rasionalitas, yakni pilihan yang diambil atas dasar kalkulasi Indonesia rugi (bagaimana seorang aktor dapat memutuskan preferensi yang saling menguntungkan atau yang saling

¹² Spainer Uslander, "America Foreign policy Making & the Democratic Dilemmas", CBS College Publishing, New York, 1982, Hal. 226.

meniadakan). Jadi, yang menjadi penting di sini adalah perkiraan apa saja dan seberapa banyak keuntungan yang di dapatkan Indonesia melalui kerja sama ini dan perkiraan apa saja dan seberapa banyak hal-hal yang harus dikorbankan Indonesia untuk menjalin kerja sama ini. Perlu diingat bahwa kalkulasi Indonesia rugi ini didasarkan pada pertimbangan jangka pendek.

Keuntungan yang mungkin di dapat Indonesia dengan menjalin kerja sama ini diantaranya adalah:¹³

1. Mendapatkan akses yang lebih besar untuk mengembangkan peralatan militer.
2. Mendapatkan akses yang lebih besar untuk membeli senjata militer tercanggih dari Rusia.
3. Mendapatkan dukungan dari negara Rusia di forum-forum internasional
4. Memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan pertahanan dalam negeri atas bantuan dari Rusia.
5. Dengan bantuan yang diberikan Rusia, Indonesia diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana pendukung lain yang pada akhirnya akan mendukung dan memperlancar pengembangan militer Indonesia.

Sedangkan kerugian yang harus ditanggung Indonesia dengan menjalin kerja sama ini diantaranya adalah:

1. Memberikan anggaran yang besar untuk membeli peralatan militer dari Rusia dan sebagainya
2. Mendapatkan tekanan dari negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan sekutunya dikarenakan Rusia adalah pesaing dari negara-negara Barat.¹⁴

F. Hipotesa

Berdasarkan keterangan dalam kerangka pemikiran dan aplikasinya, maka penulis mengambil hipotesa bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil kebijakan luar negeri untuk menjalin kerja sama di bidang pertahanan dan militer dengan Rusia dipengaruhi oleh faktor:

¹³ Muhammad Imdad Khasani, 2014, *Studi Kasus Perspektif Rational Choice Kerja sama Indonesia Dan Rusia Dalam Bidang Militer*, Makalah. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang

¹⁴ *Ibid*

1. Politik luar negeri yaitu kepentingan Ekonomi dan militer yang bertujuan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah sebagai *balance of power* atau sebagai pengimbang kekuatan besar Amerika Serikat di bidang pertahanan dan militer dan juga untuk mengurangi ketergantungan dalam bidang persenjataan.
2. Alasan rasional Susilo Bambang Yudhoyono dengan melakukan kerja sama di bidang pertahanan dan militer karena adanya keuntungan dari sisi anggaran untuk mencapai tujuan rencana strategi jangka pemerintahan di bidang militer.

G. Metodologi Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *library research* atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, website serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diambil penulis.¹⁵

H. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penulisan dalam skripsi ini agar tidak terlalu meluas, secara umum penulis membatasi penelitian pada politik luar negeri di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2014. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga akan mengambil referensi terkait peristiwa- peristiwa sebelumnya yang terkait dan dapat mendukung penelitian dalam penulisan skripsi.

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode penelitian Survei*. Jakarta, LP3ES, Hal.12.

I. Sistematika Penulisan

- BAB I** Berisi Pendahuluan yang akan menguraikan alasan pemilihan judul. Tujuan penelitian latar belakang penelitian, teori dan konsep-konsep yang melandasi penelitian serta metodologi yang dipakai dalam penelitian.
- BAB II** Menguraikan tentang Sejarah Hubungan Indonesia dan Rusia di masa pemerintahan Presiden Soekarno sampai Presiden Megawati dan hubungan kerja sama diantara kedua Negara tersebut.
- BAB III** Kerja sama Pertahanan dan Militer Indonesia Dan Rusia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada bab ini akan dibahas mengenai kerja sama di bidang militer, politik dan ekonomi antara Indonesia-Rusia dan kesepakatan perjanjian di bidang militer antara pemerintah Indonesia-Rusia.
- BAB IV** Berisi tentang Analisis Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Rusia Dalam Bidang Pertahanan Militer yang akan menjelaskan kepentingan Indonesia menjalin kerja sama dengan Rusia dilihat dari faktor dalam negeri, ekonomi militer dan konteks internasional
- BAB V** **KESIMPULAN DAN SARAN**
Pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.